

PENDIDIKAN POLITIK DAN NILAI MORAL KEAGAMAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENANGKAL POTENSI TERORISME DAN DISINTEGRASI BANGSA

Estu Miyarso dan Halili *)

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat kampus tentang terorisme dan separatisme juga untuk mengetahui implementasi pendidikan politik dan nilai-nilai moral keagamaan yang selama ini diselenggarakan dalam kegiatan kerohanian Islam di UNY sebagai upaya untuk menangkal potensi terorisme dan gejala disintegrasi bangsa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif. Subyek penelitian ini adalah seluruh civitas akademika UNY. Hasil penelitian diperoleh tiga lapisan persepsi responden tentang terorisme yaitu: lapisan sederhana dan linier, lapisan moderat merespon terorisme, dan lapisan yang kritis terhadap isu terorisme. Dalam isu disintegrasi bangsa dan separatisme, pandangan sivitas akademika relatif homogen, baik dari aspek substansi maupun faktor kausalnya. Kegiatan kerohanian Islam di UNY telah secara eksplisit dan implisit melaksanakan pendidikan politik dan juga pendidikan moral keagamaan.

Kata Kunci: Terorisme, Disintegrasi Bangsa, Pendidikan Politik, Pendidikan Moral Keagamaan, Kegiatan Kerohanian Islam

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Sejalan dengan itu, visi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tahun 2010 yaitu mampu menghasilkan insan cendekia, mandiri, dan bernurani, dengan misi mendidik manusia dan masyarakat Indonesia dengan berbagai kegiatan, yaitu: (a) menyelenggarakan pendidikan,

¹ Pasal 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembentukan insan cendekia, (b) mengembangkan sistem pendidikan yang mampu menumbuhkan lulusan yang mandiri, kreatif, dan inovatif, (c) membangun budaya akademik yang mendorong pertumbuhan nurani lulusan, (d) memantapkan sistem kelembagaan dan jejaring kerja yang menjunjang fungsi dan otonomi universitas.²

Dalam dua “dokumen” tersebut, ditekankan upaya pengembangan pendidikan yang tidak terlepas dari nilai (moral) atau akhlaq mulia para pelakunya. Praktik pendidikan yang mengesampingkan unsur nilai, moral, dan akhlaq pada akhirnya akan semakin membawa manusia sebagai pelaku pendidikan itu sendiri pada suatu kondisi kehidupan yang serba terasing.

Dalam teori humanisme, pendidikan merupakan suatu proses kehidupan seseorang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pendidikan sangat ditentukan oleh cara pandang (falsafah dan ideologi) dari para pelaku (pendidik, peserta didik, maupun pengambil kebijakan) dalam menjalankan roda kehidupannya. Dengan kata lain, pendidikan tidak bebas nilai. Dari kacamata sosiologis, pendidikan dapat dikatakan sebagai proses sosial atau proses budaya. Apapun bentuknya, pendidikan sangat berpengaruh atas dinamisasi masyarakat hingga pada akhirnya menjadi budaya tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dari perubahan sosial yang terjadi. Langsung maupun tidak langsung sadar maupun tidak, hal itu merupakan akibat dari pendidikan yang dijalani masyarakat selama ini.

² Visi dan Misi UNY 2006-2010

Hal yang memprihatinkan adalah bahwa pendidikan agama yang diterapkan di kelas maupun perkuliahan belum dapat menyentuh titik sentral dari moral peserta didik (siswa dan mahasiswa), sebab, pelajaran agama yang diberikan hanya sebatas pada nilai dan angka, hafalan ayat-ayat dalam Kitab Suci, sejarah (informasi tentang agama), dan sebagainya yang intinya sekedar mengedepankan segi kognitifnya saja. Situasi ini menyebabkan ketidaksinkronan antara keunggulan kognitif dengan keluhuran afektif.

Di sisi yang lain, “sakralisasi” agama (Islam) tanpa ada ruang dialektika yang lebih egaliter terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama seperti madrasah, pondok pesantren, bahkan perguruan tinggi yang berciri Islam sekalipun. Akibat yang terjadi adalah banyaknya out put pendidikan di sektor ini yang tahu banyak tentang ilmu agama tetapi gagap untuk dapat menyesuaikan dengan kehidupan nyata. Bahkan bagi kalangan tertentu, agama (Islam) menjadi justifikasi untuk berbuat dan berperilaku amoral dan ahumanis seperti halnya aksi terorisme maupun separatisme yang selalu muncul silih berganti meskipun para pelakunya banyak yang telah ditangkap dan dihukum mati.

Demikian halnya, banyaknya kajian-kajian keagamaan yang fanatik (negatif) bisa memicu dan menjadi penyebab pemeluk agama salah dalam memahami substansi dan implementasi ajaran agama. Kesalahan pemahaman dan implementasi tersebut dapat berujung pada tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan tujuan penerapan syari’at Islam (*maqaashid syari’ah*), seperti terorisme yang menghilangkan banyak nyawa (bertentangan dengan tujuan

hifdzun-nafs/menjaga jiwa) dan separatisme/disintegrasi bangsa yang bertentangan dengan doktrin cinta tanah air (*hubbul wathon*).

Di setiap perguruan tinggi, termasuk di Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan agama dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas kerohanian Islam yang dilaksanakan oleh *peer* (mahasiswa sejawat), di samping tentu saja Pendidikan Agama yang berbobot kurikuler. Aktivitas ini bermata dua, di satu sisi dapat memperkuat harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dari latar tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang implementasi pendidikan politik dan nilai-nilai moral keagamaan sebagai upaya untuk menangkal potensi terorisme dan gejala disintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme yang terus muncul dan terjadi di masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-naturalistik. Menurut Bogdan, Wolf dan Tymiz (dalam Sukardi, 2006: 12) tujuan dari penelitian kualitatif naturalistik adalah untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial, dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah disiapkan terlebih dahulu. Subjek penelitian ini adalah civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) serta aktivis dan penyelenggara kegiatan kerohanian Islam di kampus UNY.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik multi sumber yaitu dengan cara: (1) observasi baik secara

terbuka, tertutup, maupun tidak langsung, (2) *interview*, terutama *indepth interview*, (4) dokumentasi, dan (5) refleksi.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur logika induktif. Menurut Moloeng sebagaimana dikutip oleh Sukardi (2006: 25) teknik analisis data tersebut meliputi kegiatan mereduksi data, menampilkan data, dan kegiatan memverifikasi data untuk dapat membuat kesimpulan.

C. PANDANGAN CIVITAS AKADEMIKA TENTANG TERORISME DAN DISINTEGRASI BANGSA

Melalui penelitian sederhana ini pandangan sivitas akademika mengenai isu terorisme dan disintegrasi bangsa telah berusaha untuk digali. Dalam hal isu terorisme, pandangan sivitas akademika sangat heterogen. Pandangan sivitas akademika terhadap isu yang telah memaksa Indonesia untuk bergabung dengan dunia internasional dalam gerakan perang melawan terorisme (*combating terrorism/war against terrorism/counter terrorism*) ini dapat diklasifikasi ke dalam tiga lapisan pandangan.

Di lapisan pertama, pandangan mereka mengenai isu terorisme diasosiasikan dengan dan berpijak pada dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif yang dimaksud terkait dengan kerugian materiil, moral, dan dampak psikologis. Dosen, mahasiswa, maupun karyawan dalam lapisan ini menempatkan isu terorisme sebagai sesuatu yang sederhana saja, bahwa terorisme merupakan kegiatan yang merusak tatanan, menyebabkan kerusakan fisik, dan mendatangkan ketakutan secara psikologis.

Dilihat dari etimologis, pandangan tersebut relevan dengan definisi umum terorisme sebagai tindakan yang menyebarkan rasa takut (*terreur*), baik melalui kejahatan langsung yang bersifat ofensif, seperti mengebom, membunuh secara sistematis, dan tindakan penyerangan lainnya, atau melalui tindakan tidak langsung, seperti ancaman, klaim, dan sebagainya.

Dengan kerangka pikir demikian, maka merespon aksi teror dapat dilakukan dengan melakukan *counter-terrorism* yang kurang lebih setara dengan kegiatan terorisme tersebut, atau bahkan lebih tinggi atau lebih cepat. Dengan cara pandang ini, memberantas terorisme akan efektif dengan tindakan represi. Misalnya, pengebom harus dilumpuhkan sebelum bom diledakkan.

Lapisan kedua adalah mereka yang secara analitik mengaitkan terorisme dengan unsur ruang yang memungkinkan atau menjadi faktor kausal bagi munculnya fenomena terorisme. Dalam pandangan mereka, terorisme tidak berdiri di ruang hampa. Ada faktor yang mendorong munculnya tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian materiil, kerugian jiwa, dan ketidaktenangan psikologis yang dilakukan oleh para teroris tersebut.

Sedangkan lapisan yang ketiga adalah mereka yang secara kritis merespon terorisme, dikaitkan dengan anatomi yang terlibat dalam isu terorisme dan berusaha menelaah kepentingan yang bermain di dalamnya. Terorisme dalam pandangan kritis bukan saja relasi utama antara aktor (pelaku) dengan ruang (negara), namun relasi sangat kompleks terkait dengan berbagai kepentingan yang tidak semuanya terlihat.

Menggunakan kerangka pikir dalam lapis ketiga tersebut, isu terorisme bukanlah suatu persoalan yang mudah untuk diurai. Posisi pro dan kontra dalam diskursus terorisme bukanlah sesuatu yang sederhana. Selanjutnya, memberantas terorisme bukan saja aktivitas menormalkan relasi pelaku dan ruang, tapi juga normalisasi hubungan dengan faktor-faktor eksternal, seperti permusuhan antara berbagai elemen antar negara, normalisasi geopolitik, dan sebagainya.

Yang juga perlu diberikan penekanan pada subbab ini, ketiga lapisan pandangan mengenai terorisme di kalangan sivitas akademika UNY hampir seluruhnya tidak setuju mengaitkan terorisme dengan Islam. Seluruh pandangan menempatkan terorisme sebagai aktivitas mungkin terjadi bagi siapapun dari golongan agama manapun. Kalaupun dalam berbagai kasus melibatkan oknum-oknum yang beragama Islam dan mengatasnamakan Islam dalam setiap aktivitas teror yang dilakukan, itu tak lebih sebagai penyalahgunaan pemahaman atas ajaran Islam. Tindakan terror oleh umat Islam yang mengatasnamakan jihad dipandang oleh hampir semua informan sebagai kesalahan memahami konsep *jihad* dalam Islam.

Dengan demikian, menjadi urgen untuk menjadikan kegiatan-kegiatan keislaman (seperti tutorial dan kerohanian Islam di kampus) untuk menjadi bagian dari upaya meminimalisasi potensi terorisme dengan menggunakan konsep dan panji ajaran Islam. Kegiatan “purifikasi” ajaran Islam dari doktrin terror akan meminimalisasi tindakan teror secara preventif.

Bagaimana pandangan sivitas akademika UNY mengenai gejala disintegrasi bangsa yang antara lain hadir dalam wajah separatisme? Dalam isu

disintegrasi bangsa, pandangan sivitas akademika relatif homogen. Pandangan dan persepsi mengenai disintegrasi bangsa berpijak pada asumsi dasar bahwa gejala “pembelahan” tersebut merupakan tindakan yang merugikan bangsa Indonesia sendiri dan mengganggu proses pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Mengenai faktor kausal gejala disintegrasi bangsa, dikemukakan tiga poin utama. Faktor utama yang dipandang menyebabkan disintegrasi bangsa adalah performa penyelenggaraan negara. Pemerintah, dalam hal ini pusat, dianggap belum berhasil menyelenggarakan negara yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan hasil pembangunan. Potret kesenjangan, kemiskinan yang masih tinggi, dan kesulitan pemerintah mengakomodasi berbagai kepentingan, merupakan faktor terpenting atas munculnya fenomena disintegrasi bangsa belakangan ini.

Faktor kedua, terdapat kepentingan asing yang bermain di balik fenomena disintegrasi bangsa. Persatuan utuh bangsa Indonesia dipandang ancaman oleh beberapa bangsa di luar Indonesia. Oleh karena mereka berkepentingan mengusik integrasi Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Fenomena OPM, GAM, RMS, bahkan disntegrasi sosial seputar tahun 1965-an merupakan bukti yang menguatkan pandangan bahwa asing ikut menyebabkan gejala disintegrasi bangsa.

Faktor ketiga adalah eksistensi anasir bangsa Indonesia sendiri. Pandangan ini agak fatalistik. Multikulturalitas dan pluralitas Indonesia merupakan faktor utama penyebab kerentanan bangsa. Disintegrasi bangsa dipandang sebagai sesuatu yang *given, taken for granted*, atau *sunnatullah* semata. Memandang

negatif fenomena disintegrasi bangsa sama saja mempersoalkan multikulturalisme dan pluralisme Indonesia.

Dalam ketiga pandangan mengenai faktor kausal disintegrasi bangsa, ditekankan pentingnya kesadaran mengenai integrasi nasional, sebagai sesuatu yang akan mempercepat percepatan Indonesia sebagai negara yang terus membangun, mengantisipasi penetrasi kepentingan asing untuk menginfiltrasi kesatuan nasional, dan merekatkan anasir nasional yang multikultural dan plural.

D. PENDIDIKAN POLITIK DAN NILAI MORAL KEAGAMAAN UNTUK MENANGKAL POTENSI TERORISME DAN DISINTEGRASI BANGSA

Melihat pandangan civitas akademika mengenai terorisme dan disintegrasi bangsa, mengerucut pada urgensi dan signifikansi keterlibatan berbagai aktivitas akademik untuk ikut menjaga ketertiban umum dan integrasi nasional melalui aktivitas-aktivitas akademik dan non akademik di UNY. Salah satu yang perlu mendapatkan atensi adalah aktivitas kerohanian Islam, antara lain tutorial dan aktivitas LDK berbasis jama'ah musholla-musholla di lingkungan UNY. Aktivitas kerohanian Islam idealnya ikut mendorong pemahaman keislaman yang mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih aman dan tertib, dan mendorong proses integrasi nasional antar elemen bangsa. Kegiatan kerohanian Islam seyogyanya ikut berkontribusi memberikan pendidikan politik dan pendidikan nilai-nilai moral keagamaan untuk meminimalisasi dan menangkal potensi terorisme dan gejala disintegrasi bangsa.

Dalam berbagai aktivitas kerohanian Islam yang ada di UNY, seluruhnya dapat diklasifikasikan menjadi aktivitas formal dan aktivitas informal. Aktivitas

formal berlangsung dalam bentuk tutorial, 1 sks sebagai suplemen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tutorial, yang secara formal disebut KBMT (Kegiatan Belajar Mengajar Tutorial) dilaksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil kajian (*halaqah*) seminggu sekali. Dalam setiap kelompok terdapat satu orang tutorial yang direkrut dari kalangan mahasiswa muslim yang lebih senior. Kegiatan tutorial ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswa baru UNY yang beragama Islam.

Kegiatan informal adalah kegiatan kerohanian yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kerohanian, baik di tingkat universitas (dalam bentuk UKM) maupun di fakultas-fakultas (UKMF), yang sebagian besar berbasis pada aktivitas jamaah-jamaah musholla di fakultas-fakultas. Kegiatan kerohanian secara informal ini sebagian besar tidak berlangsung secara reguler. Beberapa program dilaksanakan secara incidental, baik dalam skala terbatas (seperti kajian intensif dalam kelompok kecil) maupun dalam skala yang luas (seperti seminar, dan sebagainya).

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan selama penelitian ini dapat dianalisis gejala bahwa di kalangan aktivis kerohanian Islam sendiri tidak semua dihadapkan pada keyakinan soal fisibilitas aktivitas mereka sebagai pendidikan politik bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan mereka. Secara umum mereka terbelah menjadi dua golongan: mereka yang membatasi aktivitas kerohanian sebagai kegiatan keagamaan semata dan tidak memiliki kaitan apapun dengan pendidikan politik.

Kelompok kedua adalah kelompok yang memandang bahwa agama dan politik adalah dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Agama memberikan dasar bagi penguatan mental, rohani dan spiritualitas, sedangkan politik memberikan ruang bagi mental, rohani, dan spiritualitas dalam diri seorang untuk digerakkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya umat manusia. Maka, dalam melakukan pendampingan junior dan aktivitas kerohanian Islam mereka tidak menabukan tema-tema politik dalam *halaqah-halaqah* atau kegiatan kerohanian Islam lainnya.

Dengan kalimat-kalimat lain dapat dinyatakan bahwa para aktivis kerohanian Islam dalam kelompok yang kedua tersebut telah melakukan pendidikan politik, meski tanpa kurikulum yang *planned* mengenai orientasi pendidikan politik tersebut. Pendidikan politik yang mereka lakukan dalam bentuk yang samar pada dua aras. *Pertama*, pada aras diskursif, dimana peserta aktivitas kerohanian Islam dikenalkan pada tema-tema kontemporer politik, mulai dari apa yang berlangsung di level negara maupun di level perpolitikan mahasiswa. *Kedua*, pada aras praktis, dimana peserta aktivitas kerohanian Islam diberikan ruang untuk mempraktikkan tindakan-tindakan politik tertentu secara sederhana, melalui musyawarah untuk mencapai aklamasi (kesepakatan bersama), negosiasi beberapa persoalan dalam kegiatan, dan sebagainya.

Mengenai pendidikan nilai moral keagamaan, para aktivis kerohanian Islam sepakat sepenuhnya bahwa mereka telah berada dalam ranah pendidikan nilai, pendidikan norma, pendidikan moral, atau pendidikan karakter. Dalam wilayah pendidikan ini semua tujuan, konten, dan metodenya dikembalikan pada

prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun perlu digarisbawahi bahwa proses pendidikan nilai ini bukan proses yang tunggal.

Banyak narasi yang berkembang dalam aktivitas kerohanian Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa situasi. *Pertama*, dalam kegiatan kerohanian yang bersifat formal yakni tutorial, peran tutor sangat besar. Tutor satu dengan tutor yang lain memiliki keragaman metodik dan keragaman interpretasi atas panduan tutorial yang ada. Meskipun ada Panduan Tutorial, keluasan dan kedalamannya tidak bisa diseragamkan, apalagi metode pembelajarannya.

Kedua, dalam kegiatan kerohanian informal, seluruh kegiatan kerohanian berada dalam simpul otoritasnya masing-masing. Kalaupun ada forum LDK yang mempertemukan berbagai aktivis kerohanian, tak berarti aktivitas kerohanian Islam yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi seragam.

Ketiga, fenomena fragmentasi antara aktivitas kerohanian Islam yang politis dengan yang apolitis.

Terkait dengan variabel terorisme dan disintegrasi bangsa, aktivitas kerohanian Islam memiliki relasi dengan upaya menangkal potensi terorisme dan distegrasi bangsa. Namun relasinya masih bersifat umum. Antara lain karena disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, sebagian besar orientasi kegiatan kerohanian Islam berada di level dakwah substantif. Bahwa orientasi sebagian besar kegiatan tersebut adalah bagaimana mereka menjadikan pesertanya memiliki aktivitas ibadah yang lebih baik, literasi al-Quran, dan sholat lima waktu dengan rutin, benar, dan tepat waktu.

Kedua, sebagian besar aktivitas kerohanian Islam belum menjadikan terorisme dan disintegrasi bangsa sebagai sesuatu yang spesifik dalam program mereka. Sehingga minimalisasi potensi terorisme dan disintegrasi bangsa merupakan hasil yang *integrative, hidden, dan unplanned*.

Ketiga, dalam hampir seluruh kegiatan kerohanian Islam belum berada pada orientasi yang sama, di wilayah politik dan nilai, terkait dengan terorisme dan gejala disintegrasi bangsa.

E. KESIMPULAN

Dalam isu terorisme pandangan sivitas akademika UNY heterogen, sementara terhadap isu disintegrasi bangsa dan separatisme relatif homogen, baik dari aspek substansi maupun faktor kausalnya.

Kegiatan kerohanian Islam di UNY telah secara eksplisit dan implisit melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan moral keagamaan. Pendidikan politik dilaksanakan secara *integrative* dan *unplanned*, dalam dua aras, *diskursif* dan *praktis*, sedangkan pendidikan moral keagamaan sebagian besar didasarkan pada substansi ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dampak pendidikan politik dan moral keagamaan yang dilaksanakan kegiatan kerohanian Islam berdampak positif bagi upaya menangkal potensi terorisme dan disintegrasi bangsa, masih bersifat umum (*integrative, hidden, dan unplanned*) yang disebabkan, terutama, oleh heterogenitas pelaku aktivitas kerohanian Islam dan belum ditempatkannya dua isu tersebut sebagai topik spesifik dalam aktivitas kerohanian. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- A Doni Koesoema. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT. Grasindo
- Agnes Chong et.al. 2007. *Antiterrorism Law: ASIO, Police, and You*. Australian Muslim Civil Rights Advocacy Network (AMCRAN) and UTS Community Law Centre
- Aka Kamarulzaman. 2005. *Kamus Istilah Serapan*. Yogyakarta: Absolut
- J Allen. 1960. "The Role of Ninth Grade Civics in Citizenship Education", *The High School Journal*, 44, 3: 106-111
- J A Banks. 1977. *Teaching Strategies for the Social Studies : Inquiry, Valuing, and Decision Making*, Reading: Addison – Wesley Publishing
- F Capra. 1998 *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya
- Dannis Kavang. *Political Culture*. 1998. Armico: Bandung.
- Estu Miyarso. 2009. *Pendidikan Politik Mahasiswa (Studi Kasus Netralitas Ormawa UNY dalam Pemilu 2009)*. Laporan Penelitian Fakultas. Yogyakarta: FIP UNY
- John L Esposito. 2003. *Unholy War* (terj.). Yogyakarta: LKIS
- Thomas S Kuhn. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press
- Lexy J.Moleong. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya
- Lickona, T. 1991. *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muchtar Mas' oed dan Collin ac Andrews. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Neil J. Smelser and Faith Mitchell (eds.). 2002. *Discouraging Terrorism: Some implications of 9/11*, Washington DC: The National Academies Press

Samuel P Huntington. "The Clash of Civilizations?". *Foreign Affairs*. Musim Panas 1993

_____ 1997. *The Clash of Civilization and The Remaking World Order*. New York: Simon & Schuster

Santosa Sastropetro. 1991. *Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*, Bandung: Alumni

Sukardi, et.al. 2006. *Panduan Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY

Tim Penyusun. *Visi, Misi, dan Tujuan Kegiatan UNY tahun 2006 – 2009*. Yogyakarta: UNY Press

Udin S. Winataputra. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi. Disertasi di PPs UPI Bandung*

Internet

<http://www.scribd.com/doc/18423292/Pendidikan-Dan-Pendidikan-Politik>

<http://www.scribd.com/doc/18795153/peranan-partai-politik-dalam-pendidikan-politik>

<http://www.scribd.com/doc/3874910/Pendidikan-Politik>

<http://www.uny.ac.id>. warta 28 Februari 2009

Identitas Penulis *)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Estu Miyarso, M.Pd. | NIP. 19770203 200501 1 002 |
| Unit Kerja : | Jurusan KTP FIP UNY |
| 2. Halili, S.Pd. | 19780514 200604 1 004 |
| Unit Kerja : | Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY |